

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditemukan beberapa data yang menarik untuk dibahas dan disimpulkan. Dari hasil analisis terhadap 2.000 data Twitter yang mencakup periode Agustus 2019 hingga Januari 2022, ditemukan bahwa 21,62% dari data tersebut berasal dari akun bot. Angka ini lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya.

Menariknya, hasil penelitian ini menemukan bahwa 44,91% dari total data yang mereka teliti merupakan akun bot. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan bot di media sosial, khususnya Twitter, bukanlah fenomena baru. Selain itu, jangkauan bot di Twitter bersifat global, sehingga fenomena ini tidak hanya terjadi secara lokal, tetapi juga berskala internasional.

Dari data yang ditemukan, terdapat indikasi bahwa mobilisasi bot mayoritas digunakan untuk mendengungkan isu tertentu, tidak lebih dan tidak kurang. Aktivitas utama dari bot ini berfokus pada membalas akun-akun media yang lebih besar, seperti misalnya akun berita @geloraco, serta akun-akun organik yang membahas atau mengkritik pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Nusantara. Selain itu, bot juga aktif membalas akun-akun besar yang memiliki pandangan terkait isu ini. Menariknya, dalam diskursus mengenai pemindahan ibu kota, mobilisasi bot menunjukkan pola yang beragam dan tidak hanya berpihak

pada satu sisi—baik pro maupun kontra. Hal ini sesuai dengan temuan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, di mana beberapa bot tampak mendukung pemindahan ibu kota, sementara data lain menunjukkan bahwa tagar yang kontra terhadap kebijakan ini juga cukup dominan. Tagar seperti #SelamatkanNegeriDariAzab, #HancurkanKezolimanKemaksiatan, dan #HancurkanKoruptorOligarki banyak digunakan dalam narasi kontra terhadap pemindahan ibu kota. Namun, data menunjukkan bahwa tagar-tagar ini lebih banyak dimobilisasi oleh bot dibandingkan oleh pengguna reguler. Sebaliknya, pengguna reguler cenderung menggunakan tagar yang lebih substantif dan berbasis pertanyaan terkait kebijakan Ibu Kota Nusantara.

Hal ini menjadi menarik dalam pengambilan kesimpulan dari analisis data yang telah diperoleh. Bot-bot ini ternyata memiliki peran signifikan dalam mendengungkan isu serta mendisrupsi diskursus di media sosial, khususnya di Twitter. Indikasi keberadaan bot dalam platform ini sudah sangat banyak, menunjukkan betapa mudahnya narasi dan diskursus yang sehat serta organik terganggu oleh mobilisasi bot.

Lebih lanjut, dalam analisis ini juga telah membedakan antara bot dan buzzer. Jika bot saja sudah mencakup sekitar 1/5 dari total diskursus di data Twitter, maka muncul pertanyaan yang lebih besar: seberapa besar pengaruh buzzer dalam membentuk opini publik di platform ini?

Fenomena ini juga menjadi kekhawatiran bagi beberapa narasumber yang telah peneliti wawancarai, yang memiliki beragam pengalaman dalam menghadapi bot serta fenomena serupa dalam karir mereka. Mereka mengatakan bahwa media sosial merupakan ancaman terbesar bagi demokrasi di seluruh dunia, bukan dalam konteks platformnya semata, melainkan karena keberadaan misinformasi dan disinformasi di dalamnya. Pengalaman pahit terhadap propaganda dan keterbatasan informasi di masa lalu kini tergantikan oleh bentuk propaganda baru—yakni kelebihan informasi—yang justru membuat masyarakat semakin sulit membedakan antara kebenaran dan kebohongan.

Bot bukanlah fenomena baru di Indonesia. Sejak tahun 2009, ketika Susilo Bambang Yudhoyono masih menjabat sebagai Presiden, bot telah menjadi bagian dari diskursus media sosial

Indonesia, jauh sebelum masa kepemimpinan Joko Widodo dan persaingan dengan Prabowo Subianto. Namun, seiring dengan perkembangan media sosial, pengaruh bot juga semakin besar. Saat ini, masyarakat Indonesia cenderung lebih mempercayai informasi yang mereka temukan di media sosial dibandingkan berita konvensional. Ketika menghadapi suatu isu, mereka lebih cenderung mencari informasi di media sosial daripada membaca berita, menelaah jurnal akademik, atau memahami data kompleks secara mandiri. Fenomena ini meningkatkan risiko pembajakan narasi oleh bot, karena konten singkat dan mudah dikonsumsi lebih menarik bagi publik dibandingkan bacaan yang memerlukan pemikiran kritis dan

analisis mendalam.

Peran bot tidak hanya terbatas pada diskusi mengenai pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara, tetapi juga mencakup berbagai isu lainnya, termasuk Pemilihan Presiden Indonesia 2024. Di media sosial, bot memiliki peran besar dalam membentuk dan mengunci opini pemilih, khususnya pemilih muda yang lebih mempercayai konten di internet daripada bacaan yang mereka anggap bertele-tele. Bot menciptakan ilusi bahwa pandangan tertentu dianut oleh mayoritas, padahal kenyataannya belum tentu demikian.

Pemindahan Ibu Kota Negara merupakan salah satu contoh dari fenomena sosial media yang lebih besar, yakni adanya industri yang bertujuan membanjiri media sosial dengan bot untuk memenangkan suatu narasi. Tujuan utamanya bukan untuk menyebarkan kebenaran, melainkan untuk mendominasi diskusi melalui kuantitas. Dalam kondisi ini, kebenaran tidak lagi ditentukan oleh isi kontennya, melainkan oleh banyaknya persetujuan yang diterima di media sosial. Dengan kata lain, kebenaran menjadi relatif dan dapat dimanipulasi sesuai kepentingan tertentu. Selama ada permintaan untuk mengendalikan opini publik, suplai bot akan terus tersedia dan industri ini akan terus berkembang.

Dinamika politik saat ini menunjukkan bahwa demokrasi modern tidak hanya bergantung pada sistem pemerintahan dan hukum, tetapi juga pada aspek digital. Batas antara ruang digital dan ruang nyata semakin kabur. Contoh nyata dari dampak bot terhadap demokrasi dapat ditemukan dalam kasus Southport di Britania Raya pada tahun 2025, yang mengungkapkan bahwa bot dan buzzer digunakan untuk menyebarkan disinformasi dengan tujuan membentuk sentimen anti-imigran dan Islamofobia. Disinformasi yang tersebar luas di media sosial bahkan memicu kerusuhan di berbagai wilayah Britania Raya, yang dikoordinasikan oleh kelompok-kelompok sayap kanan.

Temuan ini tidak hanya merefleksikan fenomena teknis semata, tetapi juga menunjukkan adanya ancaman serius terhadap kualitas demokrasi digital di Indonesia. Kehadiran akun-akun bot yang mendominasi ruang diskursus publik berpotensi membatasi pluralitas opini, mengeliminasi suara oposisi, serta membentuk arus informasi tunggal yang bias. Dalam konteks demokrasi, kondisi ini sangat problematis karena mengganggu proses deliberasi publik yang sehat, di mana seharusnya terjadi pertukaran gagasan yang otentik dan bebas dari manipulasi sistematis. Jika pola ini terus berlanjut tanpa intervensi regulatif dan peningkatan literasi digital, maka risiko terjadinya disinformasi struktural dan penyesatan opini publik akan semakin besar, yang pada akhirnya dapat menggerus integritas proses demokrasi di Indonesia dalam jangka panjang. Temuan ini sejalan dengan studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa orkestrasi bot dalam kampanye politik

seringkali berdampak pada penyesatan opini publik dan menurunkan kualitas deliberasi demokratis (Woolley & Howard, 2016).

Kasus ini menyoroti ancaman serius terhadap demokrasi global, karena disinformasi dapat menjadi alat untuk menanamkan bibit otoritarianisme baru. Dalam era digital ini, informasi telah menjadi mata uang yang sangat berharga. Namun, informasi yang salah dapat menimbulkan konsekuensi fatal bagi masa depan suatu bangsa. Jika negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris dapat terjerumus dalam jurang disinformasi, maka tidak ada jaminan bahwa Indonesia akan terhindar dari ancaman serupa.

Sebagai solusi, ketiga narasumber yang saya wawancarai beserta data yang saya kumpulkan menekankan satu hal utama, yaitu pentingnya literasi digital bagi pengguna media sosial. Tidak ada alternatif lain yang dianggap lebih efektif dalam menghadapi ancaman bot dan disinformasi di platform digital. Regulasi terhadap media sosial dalam isu ini masih menjadi perdebatan, terutama terkait dengan pihak yang akan bertanggung jawab dalam mengawasi dan menegakkan aturan tersebut. Apakah peran tersebut akan diemban oleh pemerintah, ataukah oleh perusahaan media sosial sebagai pemegang kendali atas platform mereka? Selain itu, regulasi juga dikhawatirkan dapat digunakan sebagai alat oleh pihak berkepentingan untuk mengkriminalisasi individu yang vokal, sebagaimana yang telah terjadi dalam penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. Oleh karena itu, aspek regulasi memerlukan pertimbangan yang matang

sebelum diterapkan.

Sebaliknya, literasi digital menjadi solusi yang paling ditekankan dalam menghadapi permasalahan ini. Pengguna media sosial harus memiliki kemampuan untuk membedakan antara berita yang valid dan berita yang tidak dapat dipercaya. Literasi digital tidak hanya sekedar kemampuan membaca dan mengakses informasi, tetapi juga mencakup pemahaman yang lebih mendalam terhadap isi suatu tulisan atau unggahan. Pengguna harus mampu mengidentifikasi apakah suatu informasi memiliki dasar fakta yang kuat atau sekedar hoaks, serta memahami bagaimana validitas suatu data dapat diverifikasi.

Selain itu, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran bahwa banyak postingan di media sosial dibuat dengan tujuan tertentu, termasuk oleh bot yang bertujuan menciptakan narasi tertentu atau memperkeruh diskusi publik dengan perdebatan yang tidak konstruktif. Oleh karena itu, penting bagi pengguna media sosial untuk mendidik diri sendiri dan lingkungan sekitarnya tentang cara menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Kesadaran ini harus didasarkan pada pemahaman intelektual yang kritis agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam misinformasi dan disinformasi.

Pada akhirnya, fenomena bot dan disinformasi di media sosial menjadi bagian dari kajian yang lebih luas, yaitu demokrasi digital. Ranah digital kini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses demokrasi suatu bangsa. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana

media sosial mempengaruhi opini publik, proses pemilihan umum, dan kebijakan pemerintah. Kajian mengenai demokrasi digital menjadi semakin relevan dalam konteks ini, terutama dalam memastikan bahwa masyarakat tetap memiliki akses terhadap informasi yang akurat dan dapat dipercaya di era digital yang semakin kompleks.

4.2 Saran

Salah satu tantangan utama dalam penelitian ini adalah kesulitan dalam memperoleh data yang relevan dari dalam negeri. Secara khusus, referensi mengenai penelitian terkait di Indonesia masih terbatas. Dalam upaya mencari data sekunder, peneliti sering kali harus mengandalkan sumber dari luar negeri, karena jumlah referensi dari Indonesia masih relatif sedikit jika dibandingkan dengan penelitian serupa di tingkat global.

Peneliti berharap bahwa di masa mendatang, penelitian dengan tema demokrasi digital dapat semakin berkembang di Indonesia, mengingat besarnya pengaruh media sosial dan ranah digital terhadap masyarakat serta fenomena sosial-politik di dalam negeri. Kesadaran akan pentingnya memahami aspek digital dan dinamika yang terjadi di dalamnya menjadi hal yang esensial, terutama bagi kita sebagai mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Memahami bagaimana reaksi dan dinamika publik di media sosial menjadi sangat penting, mengingat bahwa fenomena ini telah memberikan dampak nyata di lapangan dan bahkan menjadi

salah satu penggerak utama dalam pelaksanaan politik serta pemerintahan di Indonesia.

Selain itu, peneliti juga berharap penelitian serupa dapat dilakukan di platform media sosial lain, seperti TikTok, Instagram, dan Telegram. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah fokus yang hanya terbatas pada media sosial Twitter/X. Meskipun Twitter/X memiliki pengaruhnya sendiri, media sosial lain juga memiliki dampak yang signifikan, bahkan dalam beberapa aspek mungkin lebih besar. Oleh karena itu, meneliti platform lain akan semakin memperkaya wawasan dan pemahaman mengenai dinamika media sosial dalam konteks demokrasi digital.

Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi bagaimana media berbasis audiovisual seperti TikTok dan Instagram, atau platform komunikasi seperti Telegram, memiliki pola interaksi dan pengaruh yang berbeda terhadap dinamika sosial-politik. Dengan demikian, studi mengenai dampak masing-masing media sosial terhadap demokrasi dan pemerintahan di Indonesia dapat lebih komprehensif dan berkontribusi lebih besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ini.

Penelitian ini menjadi pijakan awal dalam memahami peran bot dalam komunikasi politik digital di Indonesia. Keberadaan akun tidak otentik turut menantang integritas ruang publik daring dan menguatkan urgensi tata kelola informasi yang transparan dan partisipatif.

